

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN BATU BATA
DI DESA KALEBAREMBENG KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA**

MUH. ILHAM SAPUTRA

Nomor Stambuk : 105 64 01604 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN BATU-BATA
DI DESA KALEBAREMBENG KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA.**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. ILHAM SAPUTRA

No. Stambuk : 105 64 01604 12

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu-Bata di
Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham Saputra

Nomor Stambuk : 105 64 01604 12

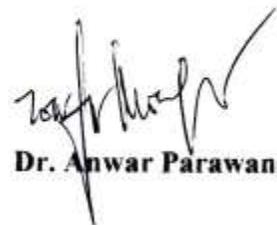
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II

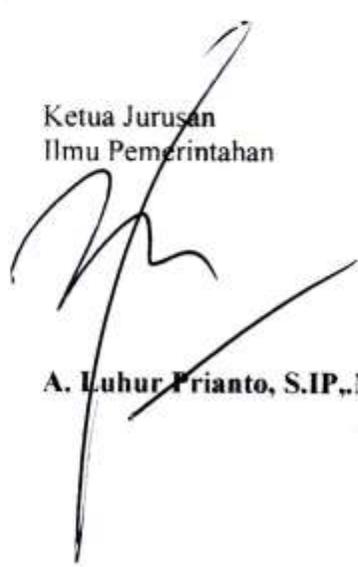

Dr. Anwar Parawangi, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

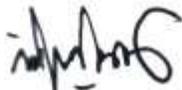

A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1773-FSP A.1-VIII/39/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) Dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu, 27 Desember 2017.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. DR. Abdul Mahsyar, M.Si
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

iii



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham Saputra

Nomor Stambuk : 105 64 01604 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Gowa, 12 April 2017

Yang Menyatakan,

MUH. ILHAM SAPUTRA

ABSTRAK

Muh. Ilham Saputra. Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu-Bata di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.(Dibimbing Oleh Fatmawati dan Anwar Parawangi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam memberdayakan pengusaha Batu-bata yang ada di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, serta untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan informan 10 (Sepuluh) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu-bata di Desa Kalebarembeng. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat pengrajin Batu-bata di Desa Kalebarembeng. Dalam hal : (a) Peran Pemerintah dalam Regulasi yang telah diupayakan oleh pemerintah yaitu membebaskan masyarakat dari segala faktor yang dapat menghambat usaha pengrajin Batu-bata (b.) Peran Pemerintah dalam Dinamisator yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan agar usaha yang mereka jalankan tidak jatuh dalam kondisi yang semakin lemah. (c) Peran Pemerintah sebagai fasilitator yaitu memberikan solusi dalam memberikan bentuk penyuluhan dan pelatihan serta membantu dalam pemasaran Batu-bata yang mereka kelolah sejauh ini.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada pengusaha batu-bata di Desa Kalebarembeng (a) Peningkatan modal usaha yang dilakukan oleh pemerintah telah memediasi pengusaha untuk melakukan pengambilan kredit usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (b) Peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah telah mengupayakan bantuan berupa mesin cetak batu-bata,. (c) Peningkatan prasarana masih belum maksimal seperti sarana infrastruktur jalan yang belum memadai karna jalan yang di akses menuju kelokasi pembuatan batu-bata sebagian belum di aspal

Kata kunci: *Pemberdayaan, Pengusaha, Masyarakat, Batu-bata .*

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu-Bata di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada Dr. Hj Fatmawati, M.Si, selaku pembimbing I dan Dr. Anwar Parawangi, M.Si pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Taklupa pula saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda Sahani dan Ibunda tercinta Salasiah atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan serta segenap do’a yang dipanjatkan dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan. Juga buat saudaraku Nurmi, yang selalu memberiku semangat, memberi

dukungan baik moril maupun non moril. Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik.S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si. selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Staf dan Pegawai Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar terima kasih atas segala bantuannya selama ini.

Dan kepada rekan, Sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas setiap bantuan dan doa yang diberikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan oleh karena itu saran dan kritiknya sangat diharapkan nuntuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah

diberikan yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini, bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 12 April 2017

MUH. ILHAM SAPUTRA

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan	7
1. Definisi Pemberdayaan	7
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	9
3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat	11
B. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan	14
C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	17
D. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan.....	21

E. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	25
F. Pendekatan Pemberdayaan	26
G. Metode Pemberdayaan Masyarakat	32
H. Masyarakat Pengrajin Batu-Bata Desa Kalebarembeng	26
I. Kerangka Pikir.....	35
J. Fokus Penelitian	36
K. Deskripsi Fokus Penelitian.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data Sekunder dan Primer	38
D. Informan Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	41
G. Keabsahan Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Peniliti	43
B. Peran Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu Bata di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	47
C. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu Bata di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.....	57

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang masih banyak didominasi oleh penduduk miskin, masyarakat dan kualitas hidup rendah, pengangguran dan masyarakat terbelakang/tertinggal, dimaksudkan agar mereka memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses dan menikmati kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga mereka mengalami peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial.

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam

kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

World Bank (2001) mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Kemampuan individu untuk mengendalikan lingkungannya, adalah suatu proses pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan politik, ekonomi dan sosial yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi pula oleh faktor sosial, politik dan psikologi. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mencerminkan paradigma baru pembangunan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap ketidak mampuan dan keterbelakangan. Dalam masyarakat yang sudah terlalu lama menyangkal kondisi kemiskinan dan ketertinggalan perlu dibantu agar dapat keluar dari *syndrome* dan perangkap yang melilitnya. Oleh sebab itu, *community development* dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang merupakan sinergi antara potensi internal dan bantuan eksternal untuk membawa masyarakat keluar dari *syndrome* dan perangkap tersebut.

Dari uraian diatas, untuk mensukseskan pemberdayaan berfokus pada pendekatan proses dalam memahami dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Misalnya perlunya pendekatan kelompok. Setiap individu dalam masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan terus kegiatan kelompok agar lebih dinamik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuatan penuh untuk membentuk hari ke depannya.

Pemberdayaan melalui kelompok setiap individu dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang tak dapat dipenuhi sendiri dengan cara bekerjasama dengan orang lain. Dengan demikian setiap individu tetap berada dalam kelompok sepanjang mereka masih percaya bahwa menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan dibanding meninggalkannya. Melalui kelompok, seseorang dapat pula mengalami proses pembelajaran serta berbagi gagasan dan perasaan dalam menunjukkan tujuan kelompok, fungsi tugas dan mengembangkan kelompok. Didalam kelompok, dapat membina kekompakan serta dapat bekerjasama dalam membuat keputusan maupun kerja yang tak dapat ditangani sendiri.

Usaha pembuatan batu batapatut untuk dikembangkan. Alasannya karena setiap gedung, rumah atau tempat tinggal pada umumnya menggunakan batu bata sebagai bahan dasar utama dalam pembangunannya. Penggunaan batu bata banyak digunakan untuk dinding pada bangunan dan pondasi. Pesatnya pembangunan di sektor perumahan dan *property* menjadikan kebutuhan akan batu bata semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan batu bata membuka peluang usaha dalam pengadaan material bangunan untuk mendukung pembangunan sektor tersebut.

Proses pembuaran batu bata terhitung sederhana tanah liat yang sudah diramu di cetak. Di jemur dan di bakat. Seorang penrajin batu bata memiliki keuntungan sekitar 5 sampai 6 juta jika menjual semua batu hasil buatannya. Jika saat ini harga jual batu bata Rp.320 per buah dan kapasitas produksi 75 ribu buah batu maka hasil penjualan jika batu bata habis total terjual Rp. 24 juta di kurangi biaya oprasional 14 juta samapi 16 juta.

Di desa Kalebarembeng kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa, berpotensi menjadi peluang usaha bagi masyarakatnya khususnya usaha produksi batu bata. terbukti saat ini desa Kalebarembeng telah memiliki sekitar 35 kelompok pengrajin batu bata . Setiap 1 Kelompok penrajin terdiri rata-rata 1 atau 2 kepala keluarga. Karena usaha pembuatan batu bata merupakan salah satu sumber penghasilan utama masyarakat setempat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan demikian. Walaupun di sana makin lama lahan yang di ambil tanahnya sebagai bahan baku pembuatan batu bata makin kurang tapi mereka harus melanjutkan usaha tersebut karna usaha ini sudah di lakukan turun menurun dari keluarga. Mereka patut mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat untuk mengembangkan usaha produktif ini. Usaha pembuat batu bata ini tidak memiliki kenaikan dan perubahan yang signifikan utamanya pada proses produksi yang masih dilakukan secara tradisional,

Masalah terkait modal yang masih menjadi masalah lain yang dihadapi para pengrajin batu bata di desa ini, yakni seringkali karena tidak memiliki uang untuk membeli bahan bakar kayu dan demi tetap melanjutkan kegiatan produksi, mereka terpaksa harus meminjam sejumlah uang kepada pemilik modal dengan syarat

mereka bersedia menjual batu bata mereka kepada pemilik modal tersebut dengan harga lebih murah. Kondisi ini tentunya sangat merugikan bagi pihak pengusaha/pengrajin batu bata. Seharusnya, masalah modal tidak lagi menjadi kendala bagi para pengrajin batu bata di desa Kalebarembeng, karena pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mempermudah akses ke sumber pendanaan bagi UMKMK (usaha mikro.kecil.menengah dan koperasi) seperti usaha batu bata. Pengrajin/pengusaha batu bata dapat mengajukan kredit di salah satu bank penyalur KUR untuk mendapatkan modal finansial secara mudah dan cepat tentunya dengan bunga rendah dan cicilan lebih ringan, asalkan memiliki izin usaha sebagai bentuk tanda bukti usaha.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa upaya pemerintah desa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat pengrajin batu bata. pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Berdasarkan masalah tersebut, maka dirasa perlu dilakukan penelitian mengenai **Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat pada latar belakang maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pengrajinbatubata di Desa KalebarembengKecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa?

2. Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat pembuat batu bata di Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan diatas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanapaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakatpengrajin Batu Bata di Desa KalebarembengKecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui bentukpemberdayaan terhadap masyarakat pengrajin batu bata di desa Kalebarembeng kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan sebagai peneliti sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis. Kegunaan akademik penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pembaca tentang kondisi atau pemberdayaan masyarakat pembuat Batu Bata di Desa KalebarembengKecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan

1. Defenisi Pemberdayaan

Pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata empower yang mekan sebetulnya adalah “*to give official authority or legal powe, capacity, to make one able to do something*” (Sudiyanto, 2005). Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses kapasitas atau pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Dengan kapasitas maka seseorang akan memiliki kekuatan (daya) atau kewenangan yang diakui secara *officia* atau *legal* sehingga orang tersebut tidak termaginalisasi lagi melainkan sebar akan harga dirinya, harkatnya, dan martabatnys. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipasif, tidak tergantung, proatif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang

diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Rumusan tersebut berbeda dengan definisi yang dirumuskan Christenson dan Robinson (1989) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal disuatu lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau lingkungan mereka. Definisi tersebut diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama warga komunitas atas prakarsa dan partisipasi mereka guna mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kehidupannya.

Upaya dalam pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.

Strategi dalam pemberdayaan ialah kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Untuk mendorong suatu kepentingan dalam memperlancar proses pemberdayaan

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangank/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;

3. Perbaiki tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin yang lebih baik;
4. Perbaiki kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan tindakan/kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;
5. Perbaiki usaha (*better business*), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
6. Perbaiki pendapatan (*better income*), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
7. Perbaiki lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;
8. Perbaiki kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
9. Perbaiki masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan kognisi, psikomotorik, dan efektif terhadap urusan sosial (akses terhadap dasar

dasar produksi tertentu), politik (kemandirian dalam pengambilan keputusan) dan psikologis untuk membangun kepercayaan diri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang seharusnya memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994). Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). Tujuan lain dari suatu proses pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya karena ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Menurut (Suharto, 2006:68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai *patner*.

2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Nasdian (2003) memaparkan sepuluh prinsip pemberdayaan masyarakat yang dianggap dapat diterapkan diseluruh dunia, yaitu :

1. Kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat, program-program (proyek) pertama harus dimulai sebagai jawaban atas kebutuhan yang dirasakan masyarakat.
2. Kemauan lokal dapat dicapai melalui upaya-upaya tak saling terkait dalam setiap bidang dasar, akan tetapi mengembangkan masyarakat yang penuh dan seimbang menuntut tindakan bersama dan penyusunan program-program multi tujuan.
3. Perubahan sikap masyarakat adalah sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat selama tahap-tahap awal pembangunan.
4. Pemberdayaan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat.
5. Identifikasi, dorongan semangat dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program.
6. Kepercayaan yang lebih besar pada partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat akan memperkuat program-program pembangunan, memapankannya dalam basis yang luas dan menjamin ekspansi jangka panjang.
7. Agar sepenuhnya efektif, proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah.

8. Penerapan program-program pemberdayaan masyarakat dalam skala nasional memerlukan pengadopsian kebijakan yang konsisten, pengaturan administratif yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, mobilitas sumberdaya local dan nasional dan organisasi penelitian, eksperimen dan evaluasi.
9. Sumberdaya dalam bentuk organisasi non pemerintah harus dimanfaatkan penuh dalam program-program pengembangan masyarakat pada tingkat local, nasional dan internasional.
10. Kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel ditingkat nasional.

Para pakar menguraikan pengertian “prinsip” dengan berbagai cara. Gudykust dan Young Yun Kim (Mulyana dalam Hakim, 2001) menyebutkan sebagai asumsi-asumsi. Sedangkan Book, CL, et al (Mulyana dalam Hakim, 2001) menyebutkan sebagai karakteristik-karakteristik. Ada pula yang menyebutkan sebagai azas-azas pengertian tersebut saling memiliki kemiripan antara satu sama dengan yang lain serta dapat dijabarkan sesuai bidang kegiatan termasuk dalam bidang kegiatan pembangunan masyarakat.

B. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat.

Perwujudan sistem ekonomi Pancasila adalah pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yang diwujudkan melalui tiga arah pembangunan. *Pertama*, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang

lemah dan kurang mampu dengan mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan dengan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan usaha masyarakat. *Kedua*, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan kepada daerah. Kekuatan sistem ekonomi Pancasila terletak pada laju pembangunan di daerah. *Ketiga*, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi, dimana yang menghasilkan harus menikmati dan yang menikmati harus yang menghasilkan. Ketiga arah pembangunan tersebut digerakkan oleh pemerintah dalam perannya sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator (Gunawan , 1999)

Menurut Arif (2012) Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi Tiga peran yaitu:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid. Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Di lain pihak, tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan, dikhawatirkan program pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan akan kurang bermanfaat, berbeda, atau bahkan mungkin bertentangan dengan kebijakan dan kesepakatan yang ada. Sehubungan dengan itu, beragam kebijakan, peraturan, dan hasil-hasil musyawarah yang harus diperhatikan (Poerwoko 2012) adalah :

- a. Kebijakan pembangunan nasional jangka panjang.
- b. Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah
- c. Kebijakan pembangunan regional dan local
- d. Peraturan-peraturan wilayah
- e. Hasil-hasil musyawarah masyarakat.

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat lebih didominasi pada pemberdayaan aspek sikap mental, oleh karena itu landasan utama strategi pemberdayaan masyarakat adalah strategi “memanusiakan manusia”. Konsep pemberdayaan mengandung dua variabel; yang diberdayakan “dan” yang memberdayakan ” Pihak “ yang memberdayakan” dapat berasal dari luar sistem “yang diberdayakan” atau dari “yang diberdayakan” itu sendiri. Akan tetapi karena demikian lemahnya posisi “yang diberdayakan” sehingga ia memiliki kemampuan terbatas untuk memberdayakan diri, maka masalah ini lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat yang dipadukan oleh sistem di luar sistem kelompok sasaran. Tiga strategi “memanusiakan manusia” sebagai dasar pemberdayaan masyarakat merupakan langkah awal dan paling penting sebelum mulai menjalankan serangkaian kegiatan memberdayakan masyarakat, pihak-pihak yang memberdayakan harus mengawali programnya dengan sudut pandang berikut :

1. Poksar (“yang diberdayakan”) adalah manusia yang memiliki potensi diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
2. Jika poksar belum mampu menemukan potensi diri tersebut maka tugas “yang memberdayakan” adalah menumbuhkan dan memperlihatkan potensi tersebut pada poksar yang bersangkutan.
3. Bantuan pihak luar dalam bentuk materi dan non materi dalam memberdayakan diri harus diposisikan hanya sebagai pelengkap.

4. Motivasi atau semangat hidup sebagai manusia yang bermartabat yang harus menjalankan perannya secara profesional, apapun bentuk peranan tersebut harus digali dan ditumbuhkan.

Aplikasi sudut pandang tersebut di tingkat lapangan adalah menempatkan batasan sebagai pihak yang diberdayakan sebagai mitra sejajar pihak “yang memberdayakan”. Seorang PPL harus menempatkan petani sebagai rekan kerja bukan sebagai manusia yang bodoh, petani adalah orang yang paling pintar di dunianya. Sikap arogansi dan perasaan “lebih” yang umumnya dimiliki oleh pihak pemberdaya harus dihilangkan. Beragam kegiatan dapat dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan potensi diri dalam rangka meningkatkan dan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan kapasitas masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dapat diupayakan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada di masyarakat setempat.

Menurut Ismawan (Priyono, 1996) menetapkan adanya 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

1. Pengembangan sumberdaya manusia;
2. Pengembangan kelembagaan kelompok;
3. Pemupukan modal masyarakat;
4. Pengembangan usaha produktif;
5. Penyediaan informasi tepat guna.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5 strategi pemberdayaan

yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan (Suharto, 1997) :

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;
2. Penguatan, yaitu melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka;
3. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;
4. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan;
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki (Totok 2012).

Usman (2003 : 40-47) berpendapat bahwa ada beberapa startegi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

D. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha (2003), diperlukan berbagai program pemberdayaan diantaranya :

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaining* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja (*quality of work life*) yang tinggi dan berorientasi kepada (1) partisipasi dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Utomo pengambilan keputusan (*participation in decision making*), (2) program pengembangan karir (*career development program*) (3) gaya kepemimpinan (*Leadership style*), (4) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (*the degree of stress experienced by employees*), dan (5) budaya organisasi (*the culture of the organization*).
- b. Pemberdayaan ekonomi, di peruntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pemberdayaan social-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human*

dignity), penggunaan *human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.

- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya.
- e. Mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu (Ndraha, 2003) :

- a. Peningkatan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah pemodalannya. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati yaitu pertama, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek pemodalannya ini adalah, (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem kondusif baru melalui usaha mikro kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem

b. Peningkatan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah prasarana, prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktifitasnya.

c. Peningkatan Keterampilan

Peningkatan keterampilan masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi, sedangkan pelatihan-pelatihan vokasiona bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya di peroleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencairan sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diluar wilayahnya.

E. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kelurahan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing nagari, desa dan kelurahan yang dapat menghimpun dan mengkoordinasikan semua sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat pemerintahannya. Tertatanya data tipologi kemiskinan pada masing-masing nagari, desa dan kelurahan. Serta meningkatnya kepedulian dan partisipasi keluarga tidak miskin dan perantau. Sasaran kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

adalah Terlaksananya Menguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang untuk Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat adalah :

1. Penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
3. Pemantapan Sistem Pendataan Profil Nagari/Desa/Kelurahan;
4. Terciptanya rasa memiliki masyarakat dan perantau terhadap setiap program pembangunan yang dilaksanakan di Nagari/Desa dan Kelurahan;
5. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga yang dapat mewadahi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Serta
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat perantau dalam memajukan pembangunan ekonomi terutama dalam mengangkat perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah

Dalam banyak kepustakaan Pemberdayaan Masyarakat, selalu disebut adanya *kelompok sasaran* atau objek Pemberdayaan Masyarakat, yaitu masyarakat, utamanya *masyarakat kelas bawah (kelompok akar rumput ,masyarakat termajinalkan)*. Pengertian itu telah menempatkan masyarakat dalam kedudukan “yang lebih rendah” dibanding para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Bertolak dari kenyataan-kenyataan tersebut menurut World Bank (2002), sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan dalam ;

1. Pelaku utama, yang terdiri dari warga masyarakat dan keluarganya

2. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan.
3. Pemangku kepentingan lain, yang mendukung/ memperlancar kegiatan pembangunan. Seperti peneliti, pelaku bisnis, pers, aktivis , dll.

F. Pendekatan Pemberdayaan

1. Penguatan kelembagaan

Kelembagaan masyarakat merupakan wadah pengembangan perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan program pemberdayaan dalam pembangunan. Pengembangan kelembagaan masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan kehidupannya. Secara sederhana, Noth dalam Hakim (1990) member makna kelembagaan (*institution*) sebagai aturan permainan (*rule of the game*). Aturan permainan diperlukan untuk mengarahkan perilaku sejumlah individu dalam pencapaian tujuan. Dalam pengertian yang lebih operasional, Uphoff dalam Hakim (1988) mengelaborasi kelembagaan dalam tiga kategori entitas yakni:

- a. Adanya sejumlah aturan yang mengarahkan perilaku individu dalam pencapaian tujuan tetapi keberfungsian aturan itu tidak dibarengi dengan entitas organisasi
- b. Adanya organisasi yang mempolakan perilaku individu tetapi tidak dibarengi dengan bekerjanya norma-norma dalam mengarahkan perilaku yang dimaksud
- c. Entitas dimana norma dan organisasi sekaligus menjelma sebagai entitas yang mengarahkan perilaku individu dalam pencapaian tujuan.

Dalam praktek pembangunan, terdapat dua unsure yang terlibat, yakni sumberdaya dan kelembagaan. Sumberdaya adalah unsur yang dikelola dalam pembangunan, sedangkan kelembagaan adalah pengelola dan cara mengelola sumber daya tersebut. Oleh karena itu, Ohama dalam Hakim (2002) mengemukakan konsep tiga unsur pengembangan yakni:

- a. Sumber daya (*resources*), unsur yang dikelola dalam pembangunan baik sumber daya alam, manusia, teknologi dan finansial
- b. Organisasi (*organization*) yakni unsur yang mengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan
- c. Norma-norma (*norms*) yaitu acuan dari organisasi sebagai pelaku dalam mengelola sumber daya untuk pencapai tujuan.

Kelembagaan adalah suatu aturan yang dikenal, diikuti dan ditegakkan secara baik oleh anggota masyarakat, yang member naungan (*liberty*) dan hambatan (*constraints*) bagi individu atau anggota masyarakat (Arifin dalam Hakim, 2004).

Arifin mengkalasifikasi dua jenis kelembagaan, yakni :

- a. Kelembagaan yang tertulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah
- b. Kelembagaan tidak tertulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat.

Pengembangan kelembagaan adalah salah satu langkah penting dalam perbaikan distribusi sumber daya dan peningkatan keadilan sosial. Kelembagaan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus atau tidak harus mengerjakan sesuatu (kewajiban atau tugas), bagaimana mereka boleh mengerjakan sesuatu tanpa intervensi dari orang lain (kebolehan atau *liberty*), bagaimana mereka

dapat atau mampu mengerjakan sesuatu dengan kebutuhan kekuatan kolektif (kemampuan atau hak), dan bagaimana mereka tidak dapat memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas namanya (ketidak mampuan atau *exposure*) (Coase dalam Arifin dalam Hakim, 2004) oleh sebab itu kelembagaan adalah serangkaian hubungan peraturan (*ordered relationship*) antara beberapa orang yang menentukan hak, kewajiban atau tepatnya kewajiban menghargai hak orang lain, privikis, dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut (Brembley dalam Arifin dalam Hakim, 2004).

2. Penguatan kelompok

Secara sederhana kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Goodman (Idianto dalam Hakim, 2004) mendefinisikan kelompok sebagai dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Margono (Setiawan dalam Hakim, 2003), kelompok ialah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan (tujuan, kebutuhan, minat, jenis) yang saling berinteraksi melalui pola struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama, dalam kurun waktu yang relatif panjang.

Haiman dalam Hakim (1951) mendefinisikan kelompok sebagai dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis eksplisit satu dengan yang lain. Sedangkan Schein (Indrawijaya dalam Hakim, 1986) mengatakan kelompok sebagai ikatan psikologis sejumlah orang-orang yang saling berhubungan, saling memperhatikan (secara psikologis), dan menerima kenyataan sebagai suatu kelompok. Haiman menyebut alasan utama keberadaan kelompok adalah bahwa

setiap anggota percaya bahwa dia akan dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang tak dapat ia penuhi sendiri dengan cara berkolaborasi dengan orang lain. Seseorang akan tetap berada dalam kelompok sepanjang ia masih percaya bahwa menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan dibanding meninggalkannya. Haiman membagi kelompok menjadi kelompok belajar dan kelompok bertindak. Kelompok belajar adalah yang terbentuk berdasarkan kebutuhan untuk berbagai gagasan dan perasaan, dan juga untuk mendapat pengertian lebih dari orang-orang lain. Sedangkan kelompok bertindak adalah kelompok yang berdasar kebutuhan untuk bekerjasama dalam membuat keputusan maupun kerja yang tak dapat ditangani sendiri.

Adapun beberapa mamfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kerjasama adalah antara lain:

- a. Persoalan yang dihadapi kelompok termasuk anggotanya seringkali terlalu berat untuk diatasi sendiri karena keterbatasan yang dimiliki. Sementara ada pihak lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam mengatasi persoalan tersebut, sehingga terjadi saling tukar pengalaman diantara keduanya
- b. Meningkatkan tugas yang harus dihadapi oleh masing-masing pihak
- c. Penggabungan sumber daya dari dua pihak atau lebih akan menghasilkan tujuan yang lebih baik (efektif dan efisien)
- d. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat mengembangkan kemampuannya sedangkan kelompok yang mandiri dalam aspek kerjasama dapat dilihat dengan cirri-ciri sebagai berikut:
 - 1) Memiliki inisiatif kerjasama

- 2) Mendasarkan pada prinsip kesetaraan
- 3) Mengoptimalkan keuntungan bagi kelompok maupun anggotanya
- 4) Cara mengembangkan kerjasama.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan usaha kelompok diperlukan kerjasama antara kelompok dengan pihak lain atau dengan pola kemitraan dengan perusahaan, lembaga keuangan atau pihak-pihak lainnya diluar kelompok. Kerjasama yang ada akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan bermitra akan lebih baik dibanding tidak bermitra (Hakim, 2010).

3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pengembangan partisipasi merupakan sebuah pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff, 1988). Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku (*stakeholders*) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka (Bank Dunia dalam Hakim, 1994).

Mubyarto dalam Hakim (1995) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Nelson (Bryant dan White dalam Hakim, 1982) menyebut dua macam partisipasi, yaitu partisipasi antara

sesama warga atau suatu anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dan atasan atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal.

Keuntungan-keuntungan lainnya dalam pengembangan partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting bagi pembangunan
- b. Mampu meniadakan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun
- c. Pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan partisipasi dan kebutuhan masyarakat
- d. Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas, meskipun dengan dana yang terbatas.
- e. Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak lain.

Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi lokalitas dan komunitas untuk mengembangkan kreativitas dalam upaya mengembangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

G. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau kerangka berpikir, menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (relevan) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metodologi

ialah suatu sistem berbuat, oleh karena itu metodologi merupakan seperangkat unsur yang membentuk satu kesatuan (Subejo dan Supriyanto, 2004). Dalam perkembangan terakhir banyak diterapkan beragam metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa :

1. RRA (*rapid rural appraisal*), merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Chamber (1980) menyatakan bahwa dibanding teknik-teknik yang lain, RRA merupakan teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat dan bersih dibandingkan teknik yang cepat dan kotor berupa sekedar kunjungan yang dilakukan secara singkat oleh seorang “ahli”. Di lain pihak, RRA dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan teknik yang lama dan kotor yang dilakukan melalui kegiatan survei yang dilakukan oleh tenaga profesional yang dipersiapkan melalui pelatihan khusus. Karena itu, McCracken et al (1988) melihat bahwa RRA lebih merupakan pendekatan riset-aksi.
2. PRA (*participatory Rapid Appraisal*) atau Penilaian Desa secara Partisipatif, merupakan penyempurnaan dari RRA atau penilaian keadaan secara partisipatif. Berbeda dengan RRA yang dilakukan oleh sekelompok tim yang terdiri dari “orang luar”, PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua *stakeholders* (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggarui.

3. FGD (*focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok yang terarah, dewasa ini FGD nampaknya semakin banyak diterapkan dalam kegiatan perencanaan dan atau evaluasi program. Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal yang oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya.
4. PLA (*Participatory Learning and Action*) , atau proses belajar dan praktik secara partisipatif, menurut konsepnya, PLA merupakan “payung” dari metode-metode partisipatif yang berupa RRA, PRA, PAR (*partisipatif action research*) dan PALM (*participatory Learning Method*). PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui: ceramah, curah-pendapat, diskusi, dll.), tentang sesuatu topik seperti pesemaian, pengolahan lahan, perlindungan hama tanaman, dll. Yang segera setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.
5. SL atau Sekolah Lapang (*Farmers Field School/FFC*), merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang alternative dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar

bersama, SL/FFS biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten.

G. Masyarakat Pengrajin Batu Bata di Desa Kalebarembeng

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gipsum dan bambu yang telah diolah, cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara arsitektur lebih indah. Batu Bata dalam sebuah bangunan rumah memiliki peranan yang sangat vital, sehingga apapun rumah tanpa batu bata belum bisa dikatakan sebuah rumah. Namun seiring perkembangan arsitektur, batu bata tak hanya sebatas pelindung sebuah rumah semata, kini peranan batu bata bergeser ke arah yang lebih luas.

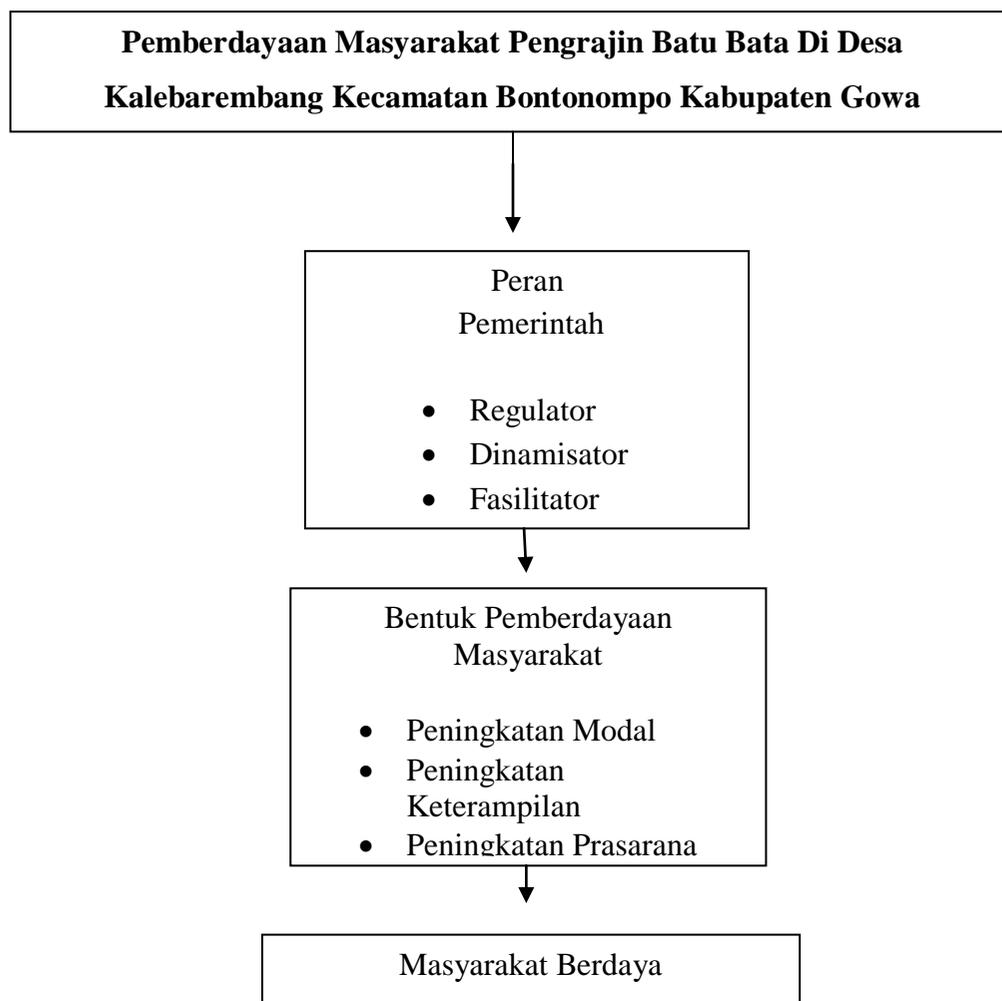
Masyarakat pembuat bata di Desa Kalebarembeng pada umumnya masih tergolong ekonomi lemah. Ini bisa dilihat dari kemampuan atau daya beli yang masih sangat terbatas. Penjualan batu bata terkadang menunggu pembeli atau pelanggan yang berasal dari pengusaha, sebagai pihak penyalur. Tentunya harga batu bata akan berkurang dibandingkan harga jika langsung dikirim ke konsumen. Ini juga diakibatkan karena tidak adanya sarana transportasi atau kendaraan milik sendiri. Pemahaman tentang penjualan untuk mendapatkan untung yang besar masih sangat kurang.

H. Kerangka Pikir

Aspek pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan usaha produktif batu bata oleh pemerintah Desa Kalebarembeng di

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan sumber daya masyarakat pengrajin batu bata menjadi hal penting untuk dilakukan dengan menggunakan lima strategi pemberdayaan, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dengan demikian, diharapkan di masa depan, usaha batu bata ini dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa Kalebarembeng.

Bagan Kerangka Pikir



J. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pengrajin batu bata di desa Kalebarembeng kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.

K. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Regulator memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pengrajin batu bata desa Kalebarembeng.
2. Dinamisator dalam penelitian ini adalah usaha pemerintah desa untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat pengrajin batu bata agar usaha yang mereka jalankan tidak jatuh dalam kondisi yang semakin lemah
3. Fasilitator yang dimaksud di sini adalah cara pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat pembuat batu bata melalui pelatihan. Peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan
4. Peningkatan modal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana masyarakat bisa mengelolah hasil yang dia dapat dari apa yang mereka hasilkan sendiri
5. Peningkatan keterampilan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Kalebarembeng bisa memperlihatkan kemampuan mereka dalam membuat batu bata dengan cara yang lebih kreasi dan mudah untuk dibuat dan bisa dipasarkan di orang-orang dengan hasil yang memuaskan.

6. Peningkatan pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yaitu, masyarakat harus lebih meningkatkan lagi alat-alat yang mereka gunakan dalam pembuatan batu bata ini,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung setelah diterbitkan surat izin penelitian. Lokasi penelitian yaitu wilayah Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, karena di desa ini terdapat usaha-usaha pembuatan batu bata.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat pembuat Batu Bata di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, gambaran, perilaku dan yang dituangkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Yang menjadi informan adalah orang-orang yang mempunyai usaha Batu Bata baik yang skala besar maupun kecil yang dianggap mampu memberikan informasi tentang data-data yang diperlukan serta aparat pemerintah Desa Kalebarendeng. Dengan informan 10 (Sepuluh) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu-bata di Desa Kalebarendeng

No.	Nama	Inisial	Keterangan
1.	Drs. Andi Syura Suaib M.Si	ASS	Kepala Dinas Prindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa
2.	Inggrtani Burhanydding. SE	IBD	Staf Dinas Prindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa
3	Saharudding Nyongri	SDY	Kepala Desa Kalebarendeng
4	Alimuddin	AMD	Sekretaris Desa
5	Anang Safri Gani	ASG	Pengusaha batu-bata
6	Ma'ruf Alam	MRA	Pengusaha batu-bata
7	Malli	MAI	Pembuat Batu-Bata
8	Daeng Tayang	DTG	Pembuat Batu-Bata

9	Mulyani Idar	MYI	Pengusaha Batu-Bata
10	Andi Daeng Boko	ADB	Pembuat Batu-Bata
JUMLAH			10 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan melalui hasil pengamatan secara langsung pada obyek penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pembuat Batu Bata di Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa .

2. Wawancara

Wawancara dan observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur atau terbuka yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara secara resmi terhadap para informan untuk menggali lebih jauh terhadap indikator penelitian yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat pembuat Batu Bata di Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (sugiono : 2012) ketiga komponen tersebut yaitu :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi data yang ditetapkan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisi data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat dilakukan.

c. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami.

d. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, penelitian sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan

G. Pengabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut Willian dalam Sugiono (2011 : 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian berapat triangulasi sumber, trigulasi pengumpulan data, dan waktu,

- a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

- b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih sehingga lebih kredibel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kecamatan Desa kalebarembeng yang menjadi lokasi penelitian.

1. Visi dan Misi Desa Kalebarembeng

Visi : terwujudnya Desa Kalebarembeng sebagai kecamatan yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

Misi : peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat, peningkatan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada pelestarian lingkungan hidup.

2. Letak Geografis Desa Kalebarembeng

Desa Kaleberembeng Secara geografis Merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian 10 – 50 diatas permukaan laut dengan interasi curan hujan pada cuaca normal antara 100 - 120 hari dalam 365 hari dengan kisaran suhu rata rata pertahun adalah 29- 31 *C

Secara Administratid Desa Kalebarembeng terletak di kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan

Luas wilayah 2.9 Km persegi setelah pemekaran desa desa Kalebarembeng adalah hasil pemeran yang ber induk di desa Barembeng.

a. Demografi/Batas Desa Kalebarembeng

- Disebalah Utara : Berbatasan Dengan Desa Bontobiraeng Selatan dan Desa Romanglasa
- Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Barembeng. Desa Bemtang Kec. Galesong Kab. Takalar
- Disebelah Barat : Berbatasan dnenga Desa Bontomangnga[e Kec.Galeosng Kab. Takalar
- Disebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Barembeng. Desa Bontolangkasa

b. Desa Kalebarembeng berbatasan dengan ibu kota kecamatan Bontonompo

- dari ibu Kota Kabupaten 20 Km.
- dari ibu Kota Provinsi 30 Km

c. Luas Wilaya Desa Dalam Tata Guna lahan

Luas Wilaya Desa Kalebarembeng 258.528 Hektar (Ha) Terdiri Dari

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Tanah Perumahan | : 42.10 ha |
| 2. Persawahan | : 211.23 ha |
| 3. Pembuatan Baru Merah | : 5.2 ha |

d. Pembagian Wilaya Desa Kalebarembeng teridi Dari 4 (Empat) Dusun Yaitu:

1. Wilayah Dusun Baerembeng Terdiri 2 (Dua) Rukun Kampung Dan 5 (Lima) Rukun Tetangga (RT).

- RK 01 Barembeng (2) RT
 - RK 02 Berembeng(3) RT
2. Wilayah Dusun Bontobaddo 1 terdiri 2 (Dua) Rukun Kampung dan 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT).
- RK 01 Bontobaddo (2) RT
 - RK 02 Bontobaddo (2) RT
3. Wilayah Dusun Bontomanai terdiri dari 3 (Tiga) Rukun Kampung dan 7 (Tujuh) Rukun Tetangga (RT).
- RK 01 Bontomanai (2) RT
 - RK 02 Bontomanai (3) RT
 - RK 03 Bontomanai (2) RT
4. Wilayah Dusun Selekowa terdiri 2 (Dua) Rukun Kampung dan 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT).
- RK 01 Salekowa (2) RT
 - RK 02 Salekowa (2) RT
- e. Kondisi dan Ciri Geologis Wilaya

Desa Kalebarembeng adalah dataran rendah dan area persawahan yang lebih luas dari pada daerah pemukiman penduduk jenis tanah coklat. Dan gambur dan beberapa tempat di temukan jenis tanah berpasir sekitar 1- 2 meter bagian bawah tanah.

Dibagian Barat desa kalebarembeng terdapat sungai yang merupakan anak sungai dari sungai Je'neberang yang bermuara ke laut daerah kabupaten

takalar. Pada daerah di sekitar sungai terbentuk pula rawa rawa yang memiliki lumpur hidup dan mata air yang kecil.

Pada bentangan persawahan di dusun Bontobaddo dan dusun salekowa membentang hamparan sawahan yang luas dan jenis tanah yang subur bahkan petani menanam padi sampai 2-3 kali.

Pada daratan pinggiran kampung di dusun Bontobaddo bagian barat struktur tanahnya keras dan padat dan di daerah ini di gunakan oleh masyarakat untuk membuat baru merah.

Tingkat kadar air pada tanah sangat basah dan sumber air pada galian tanah 2-3 meter didapatkan air jernih dan bersih

f. Kondisi dan Ciri Budaya Wilayah

Wilaya desa kalebarembeng merupakan daerah kerajaan masa lampau dan adat istiadat masih dipegang teguh oleh penduduk desa Kalenarebeng. Hal tersebut dapat dilihat pada rumah penduduk pada bagian atap depan atau bahasa makassar “ Sambulayang “ dan bahasa lainnya adalah rimba, silea. Terdapat 4 tinkatan dengan ciri- ciri atap depan dan belakan antara lain.

Lapisan lima atau lima susun timba' Silea adalah rumah Golongan Karaeng Lapisan 3 adalah rumah golongan tau baji atau keturunan karaeng. Bangsawan cendikia. Lapisan 2 adalah rumah atau masyarakat biasa. Sedangkan satu lapisan tegak adalah rumah golongan tau barani atau pemberani. Merupakan golongan yang dahulu kala nenek moyangnya adalah panlima perang kerajaan.

Ciri budaya yang masih terjaga lestari dapat juga dilihat pada pesta pesta perkawinan. Khitanan. atau acara acara adat di desa Kalebarembeng.

g. Sturuktur Kepemimpinan Dan Pelayan Publik

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai satuan organisasi dalam satu wilaya dari pemerintahan Desa Kalebarembeng memiliki fungsi yang sangat paling penting terhadap kepentingan pelayanan masyarakat. Terutama berkaitan hubungan dengan pemerintah pada level di atasnya. Kepala dusun terdiri 4 dusun memiliki peran penting dalam memntu tugas tugas kepala desa serta melakukan pendekatan persuasive masyarakat dalam pembayaran pajak. Konflik individu dan kelompok masyrakat dan tugas lain yang tertera pada aturan dan mekanisme kerja

Struktur Pemerintahan desa Kalebarembeng mengacu pada Perda Kabupaten Gowa No.54 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008.

Dalam 1 pabrik atau tempat pembuatan batu bata di desa kalebarembeng kecamatan bontonompo kabupaten gowa. memiliki pekerja biasanya sebanyak 7 orang yang biasanya juga mereka 1 atau 2 keluarga yang bekerja di dalam tempat pembuatan batu bata.

Proses pembuaran batu bata terhitung sederhana tanah liat yang sudah diramu di cetak. Di jemur dan di bakat. Seorang penrajin batu bata memiliki keuntungan sekitar 5 sampai 6 juta jika menjual semua batu hasil buatannya. Jika saat ini harga jual batu bata Rp.320 per buah dan kapasitas produksi 75 ribu buah batu maka hasil penjualan jika batu bata habis total terjual Rp. 24 juta di kurangi biaya oprasional 14 juta samapi 16 juta.

B. Peran Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu-Bata

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya yang di terjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, Berikut pernyataan Bapak Kepala Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa :

“.....Peran kami selaku Pemerintah Desa tentunya memiliki peran penting dalam mengawal masyarakat dalam pembuatan batu-bata salah satunya adalah memberikan mereka bantuan pinjaman usaha yang dijadikan modal kemudian kami juga membantu mereka dalam mencari jaringan pemasaran sehingga mereka lebih mudah memasarkan batu-bata mereka (Wawancara dengan SDY, 05 April 2017)”

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

„.....Dengan kondisi sumber daya manusia rata-rata adalah pembuat batu-bata maka kami mempertimbangkan dan kemudian menetapkan jenis bantuan modal yang akan diberikan maka dari itu kami mengupayakan bantuan dari pemerintah yang menangani bidang perindustrian yaitu Dinas Perindustrian sendiri, sejauh ini bantuan yang diberikan saya lihat yang paling bagus adalah pemberian modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di sarankan oleh pemerintah. (Wawancara AMD07 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa dalam mengevaluasi tentang bantuan yang akan diberikan pemerintah telah melakukan upaya-upaya dengan bekerjasama antara instansi terkait, dan bantuan yang paling bagus adalah pemberian modal kepada masyarakat pengrajin batu-bata yang di carikan melalui Bank BRI yang memudahkan masyarakat pengrajin batu-bata dalam mengembangkan usahanya.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh pengusaha batu-bata mengatakan bahwa,

„.....Saya selaku pengusaha batu-bata tentunya siap mendukung semua kebijakan pemerintah kepada masyarakat terutama kepada pembuat batu-bata yang apabila mendapat bantuan modal tentunya usaha kami dan para pengrajin lebih meningkat lagi dari sebelumnya . (Wawancara ASG07 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa besar harapan saya kepada pemerintah dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat dalam meningkatkan usaha batu-bata mereka sehingga mereka bisa bersain dalam peningkatankualitas batu-bata mereka.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh Masyarakat pengrajin batu-bata mengatakan bahwa,

Innakke erokku sebagai masyarakat berharap mange ri pammarentaia terkait dengan usaha niaka kuta'gala sebagai papare batu-bata nasaba kurangi modalakku sollanna kulle tonga nabantu modala naku kulle tongi kembangkangi usahaku

Artinya.....Saya selaku masyarakat tentunya berharap dengan bantuan dari pemerintah terkait dengan modal usaha kami dalam pengrajin batu-bata sebab kami memiliki keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha batu-bata kami sehingga ketika ada bantuan tentunya bisa meningkatkan usaha batu-bata kami. (Wawancara MAI07 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin dan pembuat batu bata yang mengatakan bahwa kami sadari ada hambatan dalam mengembangkan usaha kami salah satunya adalah modal, maka ketika adanya pemberian modal usaha KUR ini kami selaku pengrajin batu-bata bisa sedikit tenang dan mudah untuk meningkatkan usaha kami ini.

Hal yang sama dengan pernyataan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata mengatakan bahwa,

Sepakaka apa anjo napaua agangku sumpaeng angkanaia punna nia bantuan modala battu ri pammarentaia tantuna kulle tongi kukembangkan anne usahaku namanna mamoja naku inrang anjo modala'na

Artinya,.....Saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman kami diatas bahwa dengan adanya bantuan modal secara otomatis bisa membantu kami dalam mengembangkan usaha kami, kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan modal walau dalam bentuk pinjaman usaha (Wawancara DTG08 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin dan pembuat batu bata yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini sudah sangat membantu terutasma dalam memberikan pinjaman modal usaha,

Hal senada yang disampaikan oleh Pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa :

,.....Saya selaku pengusaha batu-bata tentunya prihatin juga dengan para perajin batu-bata bahwa kendala sejauh ini adalah modal maka dari itu kami dari pengusaha batu-bata tentunya membantu meringankan dalam artian terkadang kami memberikan modal pertama sebelum mengangkut barang mereka (Wawancara MYI 08 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa kami dari pengusaha batu-bata tentunya saling bekerjasama antara pengrajin batu-bata sebab keuntungan yang kami peroleh dari usaha kami tidak terlepas dari kinerja mereka sendiri. Dan biasanya juga pengusaha batu-bata memberi bantuan

modal ringan kepada pengrajin batu-bata sehingga hasil batu-bata yang di hasil dari pengrajin akan dia ambil dan di pasarkan

Berdasarkan beberapa pernyataan informan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari perein Pemerintah yaitu baik dari segi pemberi pelayanan ataupun sudah membantu mereka dalam memberikan bantuan modal meskipun dalam modal pijaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan tetapi tentunya sangat bisa membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka terutrama dalam membantu mencari jaringan pemasaran.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Berikut pernyataan Bapak Kepala Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa :

“.....Peran kami selaku Pemerintah Desa tentunya memiliki peran penting terutama dalam memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan sistem penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat kami terkusus bagi pengrajin batu-bata, walaupun mereka semua sudah mahir dalam pembuatan batu-bata akan tetapi kami tetap menghimbau agar mereka menggunakan alat moderen untuk membatu dan mempermudah proses pembuatan batu-bata. (Wawancara dengan SDY, 10 April 2017)”

Pernyataan di atas adalah pernyataan Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa semoga dengan adanya sitem pelatihan dan penyuluhan yang kami berikan

kepada mereka lebih memberikan mereka keahlian tersendiri dalam meningkatkan kualitas batu-bata mereka.

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

„.....Saya selaku Sekretaris Desa tentunya siap mendukung atas kebijakan dan keputusan Kepala Desa karena apa yang beliau lakukan tentunya demi kebaikan dan kemajuan para pengrajin batu-bata yang ada di Desa kami. (Wawancara AMD10 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa sangat sepakat atas kebijakan dan keputusan pemerintah desa dalam meberikan penyuluhan kepada pengrajin batu-bata dan dengan kegiatan ini diharapkan memberi pengaruh positif terhadap masyarakat terutama pengrajin batu-bata,

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh pengusaha batu-bata mengatakan bahwa,

„.....Saya selaku pengusaha batu-bata sepakat dengan sistem penyuluhan yang mendorong para pengrajin menggunakan alat moderen yang di sarankan oleh pemerintah desa maupun dinas-dinas yang terkait. Akan tetapi kurang berjalan lancar karna masyarakat pengrajin batu-bata masih memilih cara tradisional daripada penggunaan alat moderen terutamanya alat cetak batu-bata. (Wawancara ASG12 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa saat ini sangat membantu masyarakat pengrajin batu-bata dalam meningkatkan keahlian mereka dalam membuat batu-bata. akan tetapi tidak berjalan lancar karna para pengrajin masih lebih memilih menggunakan cara tradisional.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh Masyarakat pengrajin batu-bata mengatakan bahwa,

Innakke erokku sebagai masyarakat tantuna rannu dudu punna nia semacam pelatihan atau penyuluhan inggka lebih di gai ammakea cara riolo ka saba baji ki hassele na daripada ammakea masina ceta berua.

Artinya,.....Saya selaku masyarakat tentunya senang sekali dengan sistem penyuluhan dan pelatihan ini sebab masih ada keterbatasan yang kami miliki dalam pengelolaan batu-bata tapi kami memilih tetap menggunakan cara lama karna kualitas yang di hasilkan lebih bagus daripada cara menggunakan mesin cetak moderen. (Wawancara MAI12 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin dan pembuat batu bata yang mengatakan bahwa kami senang dan bangga atas kebijakan pemerintah akan tetapi kurun efektif karna para pengrajin lebih memilih cara tradisonal daripada cara moderen karna kualitas batu-bata yang di hasilkan dengan cara tradisional lebih bagus daripada cara menggunakan mesin cetak moderen.

Hal yang sama dengan pernyataan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata mengatakan bahwa,

Sependapatka anjo nakanaia urangku sumpaeng angkanaia katte anne memang ampilea cara riolo daripada anu beru a karna katte anne aseng accini ka lebih baji ka assele na

,.....Saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman kami diatas bahwa bahwa kami lebih memilih cara tradisional daripada moderen karna kami lebih memilih kualitas yang lebih baik (Wawancara DTG14 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin batu bata yang mengatakan bahwa para pengrajin lebih memilih cara tradisional karna haslnya lebih bagus.

Dari beberapa informan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator dalam memberikan sistem penyuluhan dan pelatihan kepada pengrajin batu-bata karna para pengrajin lebih memilih cara

tradisional daripada cara moderen yang di sarankan oleh pemerintah karna melihat dari kualitas batu-bata yang di hasilan lebih bagus cara tradisional daripada cara yang menggunakan mesin cetak moderen.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Fasilitatoryang dimaksud disini adalah cara pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat pembuat batu bata melalui pelatihan. Peningkatan keterampilan. serta di bidang pendanaan atau permodalan Berikut pernyataan Bapak Kepala Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa :

“..... Terkait dengan peran kami selaku fasilitator tentunya kami punya peran tersendiri dalam memberikan ruang pelatihan bentuk penyuluhan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas batu-bata yang mereka buat, tidak cuman itu kami juga memberikan pinjaman permodalan sebagai alat bantu dalam proses pembelian bahan untuk dijadikan batu-bata dan pernah memberi percobaan pembuatan batu-bata dengan menggunakan alat moderen tapi banyak keluhan dari masyarakat karna penggunaannya baik segi dari hasil batu-bata yang dihasilkan kualitasnya kuran baik dan proses perawatannya. (Wawancara dengan SDY, 19 April 2017)”

Pernyataan di atas adalah pernyataan Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa dengan ditunjuknya kami selaku fasilitator tentunya harus bekerja ekstra dalam menangani segala keluhan masyarakat terutama dalam proses pembuatan batu-bata walaupun dana yang kami berikan masih kurang dari kebutuhan proses pembuatan batu bata akan tetapi dana ini diharapkan bisa membantu.

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

,.....Saya selaku Sekretaris Desa tentunya merasa bangga dengan ditunjuknya sebagai fasilitator karena kami tahu peran kami dalam situasi seperti ini, kami selalu berusaha memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat kami dalam proses pembuatan batu-bata dengan kualitas yang cukup tinggi yang dianggap mampu bersaing dengan pembuat batu-bata yang lain dan terkait dengan penggunaan pembuatan batu-bata dengan menggunakan mesin atau moderen kami memberhentikannya dikarenakan banyak keluhan dari masyarakat terkait jekelknya hasil batu-bata yang di hasilkan dari menggunakan mesin cetak . (Wawancara AMD19 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan sejauh ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha mereka dalam pembuatan batu-bata.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh pengusaha batu-bata mengatakan bahwa,

,.....Kami merasa bersyukur dan bangga atas adanya pemerintah sebagai fasilitator walaupun tidak semuanya bantuan dalam bentuk dana, akan tetapi memberikan ruang kepada kami saja bagi kami sudah lebih dari cukup. (Wawancara ASG21 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa saat ini sangat membantu masyarakat pengrajin batu-bata walaupun tidak semua bantuan dalam bentuk dana tapi dengan adanya penyuluhan tentunya kami sedikit paham akan peningkatan kualitas batu-bata.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh Masyarakat pengrajin batu-bata mengatakan bahwa,

Innakke sebagai masyarakat tantuna sanna rannuku nasaba pammarenta Desaia sebagai fasilitator tantuna lebih gampangi kussarring abbicara langsunga punna nia kamma bantua laku pale mange ri pammarentaia labbi paiya ri maraenganna. Riolo katte sempat ji di suruh coba make alat beru ingka kodi hassele na batu

na jari tena mo di pake I. ammake inji pi tawwa alat ingka pa'jeko mami untuk pa ngonjokan ka riolo ammake ki sapi atau tedong na kamma anne ammake maki pa'jeko ka lomo-lomo I di pake

Artinya,.....Saya selaku masyarakat tentunya senang sekali dengan adanya pemerintah Desa sebagai fasilitator tentunya lebih mudah bagi kami selaku pengrajin batu-bata yang tentunya lebih mudah berkordinasi apabila kami memerlukan bantuan baik dari dana ataupun pelayanan lainnya terkait dengan peningkatan kualitas batu batu kami.Dulu kami sempata juga mencoba untuk menggunakan mesin moderen tapi karna hasil batu-batanya kuran bagus jadi kami hentikan. Sayapun masih menggunakan alat moderen lain yaitu teraktor untuk proses pencampuran bahan yang dulu kami menggunakan sapi atau kerbau dan sekarang menggunakan ptraktor (Wancara MAI22 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin dan pembuat batu bata yang mengatakan bahwa kami tidak perlu banyak tuntutan bagi pemerintah kami dengan bantuan apa saja yang diberikan tentunya sudah cukup membantu bagi kami masyarakat pengrajin batu-bata.

Hal yang sama dengan pernyataan masyarakat pengrajin pembuat batu -bata mengatakan bahwa,

Sependapatka anjo nakanai urangku sumpaeng angkanaia baji tonja'na tonja iya na nia pammarenta sebagai fasilitator sehingga gampang tongi kuare ampasarkangi batu-bataku mange ri para pengusahaiyya. Punna ammake masina katte aseng mi anne Cuma ammake pa'jeko karna lomo-lomo I di pake dari pada anjo masina le'baka na suruhanki pamarintah desaya kodi assele batunna

,.....Saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman kami diatas bahwa bahwa dengan adanya pemerintah selaku fasilitator tentunya memberikan kami kemudahan dalam mengelolah usaha kami dalam pengrajin batu- bata, tidak cuman itu pemerintah juga membantu kami memasarkan hasil pengrajin batu-bata yang kami buat sendiri. Kalau menggunakan mesin kami Cuma menggunakan traktor karna lebih mudah penggunaannya bukan mesin cetak yang di sarankan oleh pemerintah desa dulu yang kualitasnya kuran bagus dari hasil batu-bata yang di hasilkan (Wancara DTG22 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin dan pembuat batu bata yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini sudah sangat membantu terutasma dalam memberikan fasilitas berupa dana dan bantuan pemasaran bagi usaha kami

Hal senada yang disampaikan oleh Pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa :

,.....Saya selaku pengusaha batu-bata tentunya ikut senang dengan perhatian pemerintah selaku fasilitator bagi kami selaku pengrajin batu-bata, tidak cuma itu baik dari pengrajin ataupun kami selaku pengusaha batu bata merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan pemasaran batu-bata kami diluar Desa kami, walaupun kami selaku pengusaha biasa memasarkan sendiri dan sekarang lebih mudah karna dibantu dengan pemerintah. (Wawancara MYI 26 April 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan pengusaha batu-bata yang mengatakan senang sekali atas peran pemerintah sejauh ini, dengan berbagai bantuan yang diberikan kepada kami tentunya sangat membantu dan memudahkan kami dalam memasarkan usaha.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini peran pemerintah Desa sebagai fasilitator sudah terlihat efektif buktinya berbagai bantuan yang sudah diberikan sudah cukup membantu bukan hanya dalam bentuk dana akan tetapi juga menyediakan sarana dalam memberikan pelatihan, penyuluhan dalam cara pembuatan batu-bata dengan mengunaka mesin cetak walaupun tidak bertahan lama karna banyaknya keluhan dari masyarakat karna hasil yang di peroleh dari kualitasnya buruk.Akan tetapi pemerintah membantu pengusahaan dan pengranjin batu-bata memasarkan hasil batu-bata mereka .

C. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Batu Bata di Desa KalebarembengKecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Bentuk dalam pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.

Strategi dalam bentuk pemberdayaan ialah kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Untuk mendorong suatu kepentingan dalam memperlancar proses pemberdayaan fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat yang produktif dalam peningkatan pengrajin batu-bata, tentunya peran pemerintah harus lebih efektif lagi dalam melihat potensi masyarakatnya terutama dalam pembuatan batu-bata yang saat ini ditekuni oleh warga masyarakat yang ada di Desa Kalebarembeng. Di lain pihak, tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan, dikawatirkan program pemberdayaan masyarakat yang merumuskan akan kurang bermanfaat, berbeda atau bahkan mungkin bertentangan dengan kebijakan dan kesepakatan yang ada. Sehubungan dengan itu, beragam kebijakan dan hasil musyawarah yang harus diperhatikan.

Membahas tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Kalebarembeng mengenai masyarakat pembuat batu-bata. Berikut apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa :

“..... Terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat yang telah kami lakukan di Desa Kalebarembeng itu sudah berjalan baik dan lancar, salah satunya adalah kami membuka peluang bekerjasama dengan masyarakat pengrajin yang ada untuk memfasilitasi dan mengarahkan untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha mereka.(Wawancara dengan SDY, 06 Mei 2017)”

Pernyataan di atas adalah pernyataan Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan terhadap pemberdayaan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata dengan memberikan bantuan modal diharapkan mampu meningkatkan usaha batu bata mereka.

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

„.....Saya selaku Sekretaris Desa tentunya merasa bangga dengan apa yang dilakukan dengan Kepala Desa kami terkait dengan kinerja, walaupun masih ada masalah kecil akan tetapi sudah bisa dirasakan masyarakat pengrajin batu bata atas modal yang kami berikandari bantuan Bank BRI dalam bentuk KUR yang di sampai bapak tadi. (Wawancara AMD09 Mei 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa sejauh ini diharapkan kedepanya bisa memberdayakan masyarakat pengrajin batu batakarna sudah di berikan pinjaman dari Bank dalam bentuk bantuan KUR.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh pengusaha batu-bata mengatakan bahwa,

„.....Iya terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kepala Desa Kalebarembeng dengan memberikan kami fasilitas berupa bantuan modal tentunya akan lebih mengembangkan usaha kami terkusus dalam pembuatan batu bata. (Wawancara ASG10 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah Desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengrajin batu bata salah satunya adalah modal pinjaman yang diberikan pemerintah Desa.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh Masyarakat pengrajin batu-bata mengatakan bahwa,

Innakke punna erokku tantuna amminawang mama mange ri pammarentaiya niaka ri Desaiya nasaba punna bicara bantuan sanna'mi tauwa nabantu pammarenta Desaku.

,.....Saya selaku masyarakat tentunya hanya bisa mengikuti peraturan yang ada di desa, sebab bicara mengenai bantuan sudah dapat kami rasakan langsung yang diberikan oleh Kepala Desa (Wawancara MAI13 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang yang mengatakan bahwa sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah desa sejauh ini sangat membantu terutama bagi masyarakat pengrajin batu batu dan ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat Desa Kalebarembeng.

Hal yang sama dengan pernyataan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata mengatakan bahwa,

,.....Sepakatka apa anjo nakanaiya urangku angkanaiya punna bicara pemberdayaan terutama bicara modala tantuna kullemi kurasakan apa najo lebba nasareanga kepala desaku .(Wawancara DTG16 Mei 2017)

.....saya sangat sepakat apa yang disampaikan teman saya yang berbicara tentang pemberdayaan terutama dalam bantuan modal pinjaman tentunya sudah kami dapatkan bantuan modal yang diberikan kepala desa kami.

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin dan pembuat batu bata yang mengatakan bahwa tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penguatan

kelembagaan mereka lebih mengenal bahasa sederhana yang dilontarkan langsung oleh kepala Desa mereka.

Hal senada yang disampaikan oleh Pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa :

„.....Saya selaku pengusaha batu-bata tentunya ikut senang dengan apa yang dilakukan pemerintah Desa Kalebarembeng terkait pemberian fasilitas dalam pemberian modal yang diberikan kepada pengrajin batu bata dalam bentuk bantuan KUR dari Bank. Di karenakan dulu kami takut memijam dari koperasi karna bunga dari pinjaman harus di kembalikan padahal keuntungannya dari penjualan batu bata yang di terima masih belum menentu, jadi kami lebih memilih bantuan KUR karna lebih mudah. (Wawancara MYI 18 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa sejauh ini sangat membantu masyarakat dalam hal ini para pengrajin pembuat batu bata .

Dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini peran pemerintah Desa sudah berperan aktif dalam menerapkan bantuan modal yang sedikit demi sedikit sudah menyentuh langsung kepada masyarakat melalui pengarahannya untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank, dan hal ini juga diharapkan kedepannya masyarakat harus lebih meningkatkan usaha batu bata mereka.

1. Peningkatan modal untuk mewujudkan pemberdayaan terhadap pengusaha batu- batu di Desa Kalebarembeng

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering

diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.

Berbicara masalah modal dalam upaya mewujudkan pemberdayaan bagi pengusaha batu-bata di Desa Kalebarembeng berikut apa yang disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa.

“..... Terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat yang telah kami lakukan di Desa Kalebarembeng itu sudah berjalan baik dan lancar, salah satunya adalah kami bekerjasama dengan pemerintah Desa dalam memberikan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha mereka dan adapun pengajuan proposal bantuan kami juga siap membantu mereka menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan mereka. (Wawancara dengan IBD, 19 Mei 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam ini bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatakan kerjasama yang kami lakukan dengan Kepala Desa diharapkan dapat menyentuh langsung masyarakat terfokus kepada masyarakat pembuat batu-bata

Dari hasil wawancara yang kami peroleh dari informan yang mengatakan dari upaya mereka dalam memberikan bantuan modal sejauh ini sudah terealisasi kepada masyarakat pengrajin pembuat batu-bata di Desa Kalebarembeng.

Berdasarkan penyampaian di atas dan dikomentari oleh Kepala Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

..... Apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian terkait kerjasama yang kami lakukan sejauh sangat berjalan baik terutama dalam memberi pinjaman modal yang di cairkan Bank selebihnya kami juga menginstruksikan mengajukan proposal kepada dinas terkait dalam menyalurkan bantuan dana lebih besar kepada masyarakat kami terutama pengrajin pembuat batu-bata. (Wawancara AMD 19 Mei 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan terhadap pemberdayaan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata dengan memberikan bantuan modal skala kecil akan tetapi berdampak besar bagi masyarakat pembuat batu-bata di desa kalebarembeng.

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

,.....Saya selaku Sekretaris Desa tentunya merasa bangga dengan apa yang dilakukan dengan Kepala Desa kami terkait dengan kinerja, walaupun masih tidak merata akan tetapi sudah bisa dirasakan masyarakat pengrajin batu bata atas modal yang kami berikan walaupun jumlahnya sedikit sekitar 8 sampai 14 juta karna masyarakat di sini masih takut meminjam lebih karna takut susah untuk pengembaliannya. (Wawancara AMD19 Mei 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa sejauh ini diharapkan kedepanya bisa memberdayakan masyarakat walaupun pemberian modal sedikit karna masyarakat masih takut untuk mengambil pinjaman lebih banyak

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh pengusaha batu-bata mengatakan bahwa,

,.....Iya terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kepala Desa Kalebarembeng dengan memberikan kami fasilitas berupa bantuan modal tentunya akan lebih mengembangkan usaha kami terkhusus dalam pembuatan batu bata. (Wawancara ASG 20 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah Desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengrajin batu bata salah satunya adalah modal yang diberikan pemerintah Desa.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh Masyarakat pengrajin batu-bata mengatakan bahwa,

Innakke punna erokku tantuna amminawang mama mange ri pammarentaiya niaka ri Desaiya nasaba punna bicara bantuan sanna'mi tauwa nabantu pammarenta Desaku mae ri Bank ga.

,.....Saya selaku masyarakat tentunya hanya bisa mengikuti peraturan yang ada di desa, sebab bicara mengenai bantuan sudah dapat kami rasakan langsung yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank (Wawancara MAI 20 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah desa sejauh ini sangat membantu terutama bagi masyarakat pengrajin batu bata dan ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat Desa Kalebarendeng.

Hal yang sama dengan pernyataan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata mengatakan bahwa,

,.....Sepakatka apa anjo nakanaiya urangku angkanaiya punna bicara pemberdayaan terutama bicara modala tantuna kullemi kurasakan apa najo lebba nasareanga kepala desaku .(Wawancara DTG 20 Mei 2017)

.....saya sangat sepakat apa yang disampaikan teman saya yang berbicara tentang pemberdayaan terutama dalam bantuan modal tentunya sudah kami dapatkan bantuan modal yang diberikan kepala desa kami.

Pernyataan di atas adalah pernyataan masyarakat pengrajin dan pembuat batu bata yang mengatakan bahwa tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan mereka lebih mengenal bahasa sederhana yang dilontarkan langsung oleh kepala Desa mereka.

Hal senada yang disampaikan oleh Pengusaha batu-bata yang mengatakan bahwa :

,.....Saya selaku pengusaha batu-bata tentunya ikut senang dengan apa yang dilakukan pemerintah Desa Kalebarendeng terkait pemberian fasilitas dalam pemberiaan modal yang diberikan kepada pengrajin batu bata.(Wawancara MYI 20 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa sejauh ini sangat membantu masyarakat dalam hal ini para pengrajin pembuat batu bata .

Dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini peran pemerintah Desa sudah berperan aktif dalam menerapkan bantuan modal. Bantuan modal KUR adalah bantuan utama dalam melaksanakan peningkatan modal usaha karna bantuan uang tentu saja menjadi faktor keberhasilan dan mendukung meningkatnya keberhasilan usaha.

2. Peningkatan Keterampilan Terhadap Pengusaha Batu-bata di Desa Kalebarembeng

Keterampilan merupakan suatu nilai yang dapat memberikan suatu keberhasilan dalam suatu produksi dalam suatu perusahaan termasuk pembuatan batu-bata sendiri, tanpa adanya keterampilan maka sulit pengusaha dapat mengembangkan hasil produknya. Berikut penyampaian Kepala Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

“..... Masala keterampilan sebenarnya masyarakat di sini sudah terampil karna keahlian membuat batu-bata sebenarnya sudah di peroleh sejak turun tenurun dari orang tua mereka, Sehingga untuk meningkatkan keterampilan membuat batu-bata tidak di perlukan lagi oleh masyarakat di desa kalebarembeng ini, yang dibutuhkan hanya bagaimana agar penrajin batu-bata disini tetap bisa berdaya dan menghasilkan produk yang berkualitas. (Wawancara AMD 21 Mei 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Bapak Kepala Desa pengrajin batu-bata di sini keterampilanya sudah bagus karna keahlian pengrajin batu-bata desa

kalebarembeng telah di peroleh secara autodidad yang di wariskan oleh orang tua merekan sehingga hasilpun sudah kualitas baik.

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

“..... Ya betul apa yang di katakan oleh kepala desa kami, dulu ada beberapa upaya yang kami lakukan terkait masalah keterampilan pengusaha batu-bata di desa kalebarembeng di antaranya adalah untuk menggunakan mesin cetak pembuat batu-bata akan tetapi program tersebut tidak bertahan lama karna hasil produksi batu-bata yang di hasilkan tidak baik. (Wancara AMD26Mei 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Sekretaris Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa pernah ada pernah ada program keterampilan akan tetapi program tidak berjalan lama karna hasilnya kurang baik

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh pengusaha batu-bata mengatakan bahwa,

,.....Iya terkait dengan peningkatan keterampilan yang diberikan pemerintah desa pernah ada tapi tidak bertahan lama, kami hanya bisa melakukan upaya dengan lebih mengedepankan kualitas agar usaha batu-bata di desa Kalebarembeng semakin meningkat melalui bahan yang berkualitas karena tidak sembarangan tanah yang digunakan dalam pengolahan proses membuat batu-bata ini. (Wancara ASG 26 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa dalam upaya meningkatkan usaha produksinya agar kualitas yang di hasilkan berkualitas bagus, karna bahan yang digunakan tidak sembarang tanah. Karna jika tanah yang digunakan teksturnya tidak sesuai standar maka hasilnya akan mudah rusak.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh Masyarakat pengrajin batu-bata mengatakan bahwa,

Riolo le'ba ji niak anjo makea masina ingka di bokoi ka kodi assele batunna jari ammotereki make cara tradisional poeng ka nassa mi baji assele na.

Artinya,.....beberapa tahun lalu pernah yang menggunakan mesin cetak akan tetapi di tinggalkan karna hasilnya kuran bagus jadi kami memilih cara tradisional karna hasilnya batu-batanya kualitasnya bagus(Wawancara MAI 20 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang yang mengatakan bahwa masyarakat penrajin batu-bata kembali menggunakan cara tradisional karna cara penggunaan alat cetak batu-bata yang di sarankan pemerintah Desa Kalebarembeng kualitasnya kuran bagus.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa program peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup bagus karna pemerintah ingin agar penrajin batu-bata berpindah dari cara pembuatan batu-bata dengan cara tradisional ke yang lebih moderen dengan menggunakan mesin cetak batu-bata akan tetapi kuran memuaskan masyarakat penrajin batu-bata karna kualitas yang di hasilkan dengan cara menggunakan mesin hasil batu-batanya jelek.

3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam tujuan pemberdayaan masyarakat pembuat batu-bata di Desa Kalebarembeng.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama

pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut, mengenai masalah pemberdayaan yang dilakukan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pengusaha pembuat batu-bata, maka berikut wawancara dengan bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatakan bahwa;

“..... Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang kami lakukan selaku Dinas Perindustrian tentunya kami memberikan kontribusi kepada pengrajin dan pengusaha batu-bata salah satunya yang kami berikan adalah mesin pencetak batu-bata yang harapan kami tinggal masyarakat yang mengembangkan usahanya sehingga lebih mudah dan memiliki nilai jual yang tinggi.(Wawancara dengan IBD,29 Mei 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam ini bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan sejauh ini tentunya harapan kami para penrajin pembuat batu-bata lebih mudah dalam mengelolah batu-bata

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Kepala Desa Kalebarembeng yang mengatakan bahwa,

.....Apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian memang benar bahwa apa yang telah diberikan dalam bentuk mesin pencetak batu-bata, akan tetapi masyarakat menggunakan cara itu karna menurutnya hasil kualitas batu-batanya jelek. Jadi dalam Peningkatan sarana dan prasaranayang kami lakukan untuk masyarakat kususnya penrajin batu-bata sudah ada tapi saya akui masih belum memadai. Seperti infrastrustur jalan. (Wawancara AMD 29 Mei 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan terhadap pemberdayaan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata dengan memberikan bantuan mesin pencetak batu-bata akan tetapi hasil kualitas batu-batanya kuran bagus jadi tidak bertahan lama, dalam masalah

sarana memang sudah ada tapi masih kurang memadai seperti infrastruktur jalan yg sebagian dari jalan Desa Kalebareng sudah rusak dan sebagian lagi masih belum diaspal.

Berdasarkan penyampaian diatas dan dikomentari oleh Sekretaris Desa Kalebareng yang mengatakan bahwa,

„.....Apa yang di katakan pak Desa memang benar. Sarana dan prasaran dalam hal infrastruktur jalan masih kurang, akan tetapi kami sudah mengupayakan perbaikan jalan dalam 2 tahun belakangan ini walaupun masih sebagian wilayah desa kalebareng belum di perbaiki. (Wawancara AMD29Mei 2017)

Pernyataan di atas adalah pernyataan Sekretaris Desa Kalebareng yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah desa sejauh ini diharapkan kedepannya bisa memberdayakan masyarakat pengrajin batu bata dengan memperbaiki sarana dan prasarana utamanya infrastruktur jalan yang biasanya dilalui oleh mobil truk yang membawa bahan baku pembuatan batu-bata atau batu-bata yang sudah di buat dan siap untuk di kirim ke pembeli.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh pengusaha batu-bata mengatakan bahwa,

„.....Iya terkait sarana menurut saya memang kurang apalagi dalam sarana transportasi yaitu jalan yang kurang bagus apalagi kalau memasuki di tempat pembuatan batu-bata yang jalannya masih tanah akan menyulitkan apabila ingin mengambil batu-bata yang sudah ingin di kirim.(Wawancara ASG 29 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah Desa masih kurang dan di harapkan pemerintah desa akan memperbaiki infrastruktur utamanya jalan yang di lewat oleh truk yang ingin membawah hasil produksi pengrajin batu-bata yang jalannya masih tanah dan susah untuk di lalui.

Penyampaian diatas dan dikomentari oleh Masyarakat pengrajin batu-bata mengatakan bahwa,

Innakke sebagai masyarakat erok ku ji berharap punna tempa'na oloanga maen anjoeng di tempat ku di pabajiki na lomo-lomo mae anjoeng ka saba punna bosu okalaki di olio.

Artinya,.....saya sebagai masyarakat biasa cuma berharap jalan ke tempat pembuatan batu-bata di perbaiki supaya memudahkan kami para penrajin aksesnya gampang, karna jalannya masih dari tanah dan apabila hujan susah untuk di lewati.(Wawancara MAI 29 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa di harapkan pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang akan dilalui untuk lebih gampang mengakses tempat pembuatan batu-bata.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini seperti yang kita tau peran pemerintah bahwa model pemberian prasarana yang telah diberikan kepada masyarakat adalah berupa mesin pencetak batu-bata yang bermaksud untuk memudahkan para pengrajin batu-bata yang ada di desa Kalebarembeng. Akan tetapi tidak bertahan lama karna kualitas batu-bata yang di hasilkan jelek. Dalam model sarana peran pemerintah masih belum memadai terutama yang menyangkut infrastuktur jalan. karna infrastuktur jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam mendukung pergerakan ekonomi suatu daerah. Jadi peran pemerintah dalam menangani masalah sarana dan prasarana yang di lakukan kepada pengrajin batu-bata di desa kalebarembeng di kategorikan belum maksimal karna program-program yang dilakukan belum tepat sasaran dan kurang memberikan manfaat kepada objek, serta masih minimnya program yang dilakukan menyangkut pemberdayaan tersebut,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada pengusaha batu-bata di Desa Kalebarembeng (a) Regulasi yang dilakukan oleh yaitu pemerintah telah membebaskan masyarakat dari segala faktor yang dapat menghambat perkembangan usaha masyarakat pengrajin batu-bata. (b) Dinamisator yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat pengrajin batu-bata agar usaha yang mereka jalankan tidak jauh dari kondisi yang semakin lemah. (c) Fasilitator Pemberian Dana akan tetapi baik dari penyuluhan, pelatihan dalam peningkatan keterampilan diharapkan mampu meningkatkan kualitas para pengrajin batu-bata yang di Desa Kalebarembeng.
2. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada pengusaha batu-bata di Desa Kalebarembeng (a) Peningkatan modal usaha yang dilakukan oleh pemerintah sudah dapat sangat membantu penrajin, karena pemerintah telah memediasi pengusaha untuk melakukan pengambilan kredit usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pemberian usaha oleh pemerintah Dinas Perindustrian melalui pengajuan proposal berdasarkan permintaan sesuai kebutuhan masyarakat pengrajin pembuat batu-bata. (b) Peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah telah mengupayakan bantuan berupa mesin cetak batu-bata, hanya saja menurut masyarakat bantuan tersebut tidak bisa di manfaatkan

kaarna kualitas dari hasil batu-bata tersebut jelek dan masyarakat lebih memilih pembuatan batu-bata dengan cara tradisional akan tetapi masih menggunakan sebagian prosesnya sudah menggunakan mesin contoh pada pengilingan atau pencampuran yang telah menggunakan traktor. (c) Peningkatan prasarana masih belum maksimal seperti sarana infrastuktur jalan yang belum memadai karna jalan yang di akses menuju kelokasi pembuatan batu-bata sebagian belum di aspal dan masih jalan dari tanah yang sangat mengganggu saat proses pengangkutan di Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan kelompok pengusaha Batu-Bata, sehingga dalam membuat program lebih memperhatikan kebutuhan kebutuhan pengusaha untuk meningkatkan hasil produksi yang dihasilkan agar dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
2. Diharapkan Pemerintah lebih meningkatkan sistem pembinaan terhadap masyarakat, sosialisasi serta memberikan pemahaman tentang pentingnya mengelolahpotensi yang kita miliki dan dapat mengembangkan kerjasama yang lebih teratur bersama dengan Masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat pengrajin batu-bata bisa berjalan secara efektif
3. Diharapkan Pemerintah lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat pengrajin batu-bata baik dari sektor pengadaan sarana dan prasaran peningkatan sistem penyuluhan, pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat pengrajin batu bata sehingga pemberdayaan benar-benar dirasakan masyarakat di Desa Kalebarembeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikelsiana, 2015. *Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli*<http://www.artikelsiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html>(diakses pada hari kamis tanggal 17 maret 2016)
- Arif., 2012. *Peran dan fungsi pemerintah*, pada 12 februari 2012<http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html>.di ambil tanggal 15 januari 2017.
- Buku, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Fisipol Unismuh Makassar.
- Chistenson dan Robinson,1989. *Cpmmunity Development in Perspective*, Ames: Iowa State University Press.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*’, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ife, 1995.*Community Development; Greeting Community Alternatives*, Vision, Analisis and Practive. Australia ; Longman
- Ishandi Rukminto Adi, 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* . Jakarta: Lembaga Penerbit Fekultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jasper, James M. 2010. Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?.*Sociology Compass* 4/11 (2010): pp.,965-976, 10.1111/j.9020.2010.000329.x.,New York: Graduate Center of the City University of New York.
- Kartasasmita, 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Makalah disampikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur. Surabaya, 14 Maret 1997
- Lukman Hakim, 2010. *Pemberdayaan Masyarakat: Sketsa Teori dan Pedesaan*. Makassar: CV. Berkah Utami
- Mardikanto Totok , dkk. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat , Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung .
- Mujiyadi dan Gunawan, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat: Miskin (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Industri)* dalam Informasi Vol 5

- Nol.1 Januari 2000. Jakarta: Balitang Depsos RI.
- Mulyana, 2001. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasdian, 2003. *Pengembangan Masyarakat*. Bahan Kuliah Departemen Ilmu- Ilmu Sosial Ekonomi. Institut Pertanian Bogor.
- Ndraha, 2003. *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Direksi Cipta
- Nikenveronica. 2011. *Pengertian Falsafah Konsep Dan Prinsip Penyuluhan Pembangunan*. <https://nikenveronica.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-falsafah-konsep-dan-prinsip-penyuluhan-pembangunan/> (diakses pada hari Kamis tanggal 17 maret 2016)
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Sipahelut, Michel. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis. IPB. Bogor.
- Sudiyanto, 2005. *Memberdayakan Sumber Daya Manusia Petani. Makalah Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 21 September 2005 Program Penyuluhan Pembangunan IPB Bogor.
- Subejo dan Supriyanto, 2004. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Aksara
- Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*, Makalah Seminar. Bandung.
- Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soeharto, 1997. *Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Offset
- World Bank, 2001. *Attacking Poverty With a Three- Pronged Strategy*. *World Bank Policy and Research Bulletin* Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 Oktober- Desember 2000/ Januari- Maret 2001.
- Wrihatnolo, Randi R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.